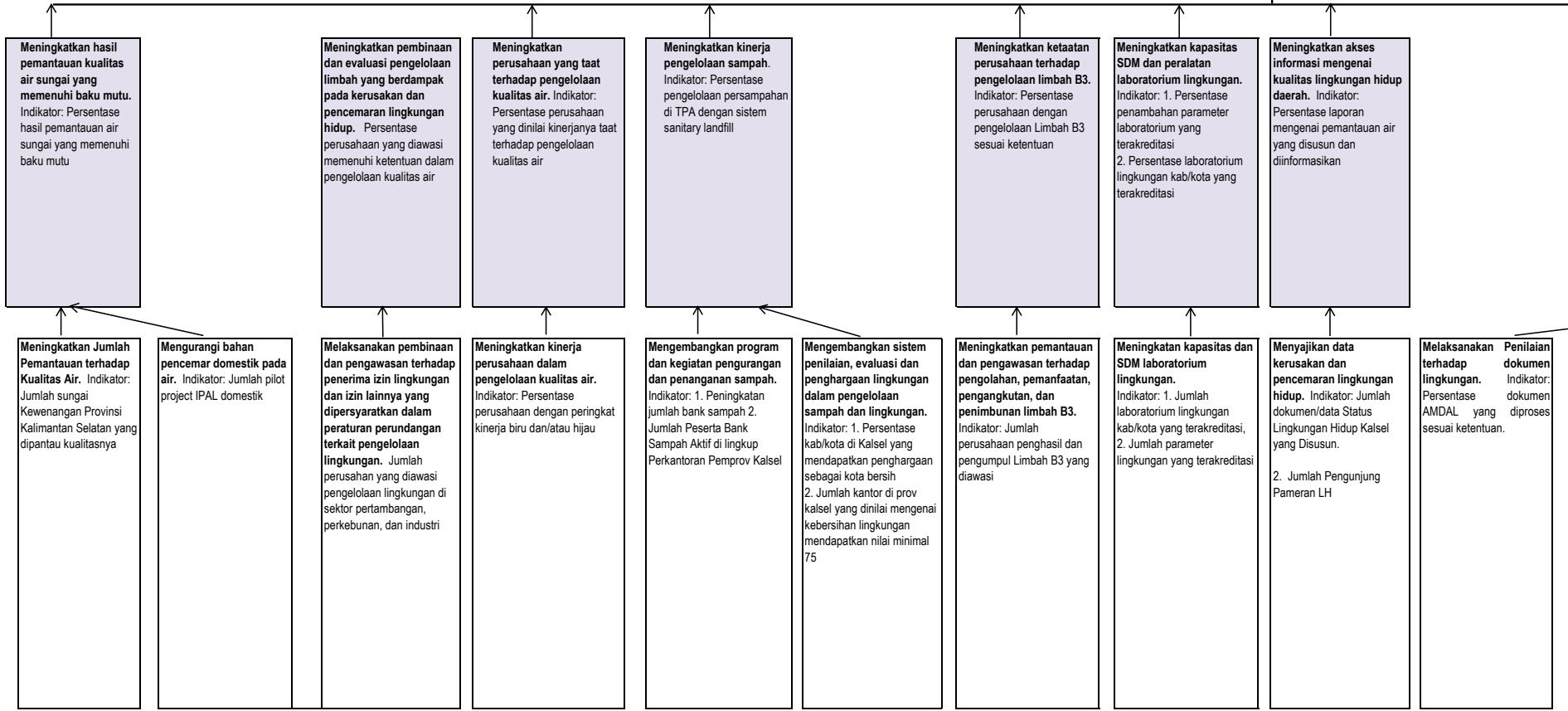




TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
INDIKATOR: INDEKS KUALITAS AIR



NYAWAN HIDUP

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan lingkungan pada tingkat Provinsi maupun kab/kota. Indikator: 1. Persentase Dokumen KRP Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan rekomendasi lingkungan
2. Persentase dokumen AMDAL Provinsi yang mendapatkan rekomendasi izin lingkungan

Mempercepat Pembangunan TPA Regional. Indikator: Persentase proses pengadaan pembebasan lahan TPA Regional

Meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup. Indikator: Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan secara hukum

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur LH. Indikator: Jumlah ASN yang mendapat sertifikat kompetensi

Meningkatkan hasil pemantauan kualitas udara memenuhi baku mutu. Indikator: Persentase hasil pemantauan kualitas udara memenuhi baku mutu

Meningkatkan perusahaan yang taat terhadap pengelolaan kualitas udara. Indikator: Persentase perusahaan yang dinilai kinerjanya taat terhadap pengelolaan kualitas udara

Meningkatkan pembinaan dan evaluasi pengelolaan limbah yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusahaan yang diawasi memenuhi ketentuan dalam pengelolaan kualitas udara

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian dokumen lingkungan di Kabupaten/kota. Indikator: 1. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terkait penilaian AMDAL
2. Persentase Komisi Penilai AMDAL yang Dievaluasi Kinerjanya
3. Persentase Pembinaan RKL/RPL bagi Perusahaan yang Baru Mendapatkan Izin Lingkungan

Meningkatkan sinkronisasi RPPLH nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indikator: 1. Persentase Pelaksanaan RPPLH yang dimonitor/review sesuai ketentuan
2. Persentase RPPLH Kab/kota yang diverifikasi sesuai ketentuan
3. Persentase pelaksanaan KLHS (prov dan kab/kota) yang dimonitor/direview sesuai ketentuan

Meningkatkan jumlah dokumen perencanaan dan perlindungan LH. Indikator: 1. Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2. Jumlah KLHS kab/kota yang divalidasi
3. Jumlah Pantai dan laut yang diidentifikasi potensi kerusakannya

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam. Indikator: Jumlah keglusaha yang dimutakhirkan perhitungan beban pencemarannya

Meningkatkan luas lahan yang diperuntukan sebagai TPA Regional. Indikator: Jumlah Persil lahan yang diproses terkait pembebasan Lahan TPA Regional

Meningkatkan penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup. Indikator: 1. Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH
2. Persentase penyelesaian hukum kasus LH

Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Indikator: Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi

Jumlah Pemantauan terhadap Kualitas Lingkungan Udara. Indikator: Persentase kab/kota yang dipantau kualitas udaranya

Meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas udara. Indikator: Persentase perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan terkait pengelolaan lingkungan. Jumlah perusahaan yang diawasi pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri

POHON KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALSEL

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR: INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR : INDEKS KUALITAS UDARA

Meningkatkan penurunan emisi GRK.
Indikator: Persentase penurunan emisi GRK

Melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).
Indikator: 1. Jumlah sektor kegiatan yang dilakukan perhitungan Emisi GRK 2. Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk

Meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan laboratorium lingkungan.
Indikator: 1. Persentase penambahan parameter laboratorium yang terakreditasi
2. Persentase laboratorium lingkungan kab/kota yang terakreditasi

Meningkatkan kapasitas dan SDM laboratorium.
Indikator: 1. Peningkatan laboratorium lingkungan kab/kota yang terakreditasi, 2. Jumlah parameter lingkungan yang terakreditasi

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan lingkungan pada tingkat Provinsi maupun kab/kota.
Indikator: 1. Persentase Dokumen KRP Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan rekomendasi lingkungan
2. Persentase dokumen AMDAL Provinsi yang mendapatkan rekomendasi izin lingkungan

Melaksanakan Penilaian terhadap dokumen lingkungan.
Indikator: Persentase dokumen AMDAL yang sesuai ketentuan.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian dokumen lingkungan di Kabupaten/kota.
Indikator: 1. Jumlah kab/kota yang dievaluasi terkait penilaian dokumen AMDAL
2. Persentase Komisi Penilai AMDAL yang Dievaluasi Kinerjanya
3. Persentase Pembinaan RKL/RPL bagi Perusahaan yang Baru Mendapatkan Izin Lingkungan

Meningkatkan sinkronisasi RPPLH nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Indikator: 1. Persentase Pelaksanaan RPPLH yang dimonitor/review sesuai ketentuan
2. Persentase RPPLH Kab/kota yang diverifikasi sesuai ketentuan
3. Persentase pelaksanaan KLHS (prov dan kab/kota) yang dimonitor/direview sesuai ketentuan

Meningkatkan jumlah dokumen perencanaan dan perlindungan LH.
Indikator: 1. Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2. Jumlah KLHS kab/kota yang divalidasi

Meningkatkan akses informasi mengenai kualitas lingkungan hidup daerah.
Indikator: Persentase laporan mengenai pemantauan kualitas udara yang disusun dan diinformasikan

Menyajikan data kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Indikator: Jumlah dokumen/data Status Lingkungan Hidup Kalsel yang Disusun.
Penyelenggaraan Pameran LH

Meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup.
Indikator: Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan secara hukum

Meningkatkan penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup.
Indikator: 1. Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH 2. Persentase penyelesaian hukum kasus LH

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur LH.
Indikator: Jumlah ASN yang mendapat sertifikat kompetensi

Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan.
Indikator: Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi

Meningkatkan luas tutupan lahan.
Indikator: Persentase peningkatan luas tutupan lahan

Menurunkan kerusakan terhadap lahan.
Indikator: 1. Jumlah Lokasi Gambut yang rusak yang teridentifikasi
2. Jumlah Lokasi Lahan Akses Terbuka yang Teridentifikasi
3. Jumlah Taman Kehati yang dipelihara

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
INDIKATOR: INDEKS TUTUPAN HUTAN

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN II

Meningkatkan peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup.
Indikator: 1. Jumlah sekolah peserta adiwiyata nasional dan internasional
2. Jumlah peserta Kalpataru tingkat nasional yang diusulkan

Meningkatkan pembinaan dan evaluasi pengelolaan limbah yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Persentase perusahaan yang diawasi memenuhi ketentuan dalam pengendalian kerusakan lahan

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan lingkungan pada tingkat Provinsi maupun kab/kota.
Indikator: 1. Persentase Dokumen KRP Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan rekomendasi lingkungan
2. Persentase dokumen AMDAL Provinsi yang mendapatkan rekomendasi izin lingkungan

Menyusun data dan memberikan informasi mengenai status lingkungan hidup daerah.
Indikator: Persentase laporan mengenai kerusakan lahan yang disusun dan diinformasikan

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
Indikator: 1. Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKjIP Dinas LH. 2. Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKjIP Dinas LH

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam akses lingkungan hidup.
1. Jumlah titik penghijauan. 2. Jumlah Abdi Persada Lingkungan/Kalpataru yang Diusulkan, 3. Jumlah Saka Kalpataru Tingkat Prov Kalsel 4. Jumlah sekolah peserta adiwiyata tingkat Provinsi

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan terkait pengelolaan lingkungan.
Jumlah perusahaan yang diawasi pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri

Melaksanakan Penilaian terhadap dokumen lingkungan.
Indikator: Persentase dokumen AMDAL yang diproses sesuai ketentuan.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian dokumen lingkungan di Kabupaten/kota.
Indikator: 1. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terkait penilaian AMDAL
2. Persentase Komisi Penilai AMDAL yang Dievaluasi Kinerjanya
3. Persentase Pembinaan RKL/RPL bagi Perusahaan yang Baru Mendapatkan Izin Lingkungan

Meningkatkan sinkronisasi RPPLH nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Indikator: 1. Persentase Pelaksanaan RPPLH yang dimonitor/review sesuai ketentuan
2. Persentase RPPLH Kab/kota yang diverifikasi sesuai ketentuan
3. Persentase pelaksanaan KLHS (prov dan kab/kota) yang dimonitor/direview sesuai ketentuan

Meningkatkan jumlah dokumen perencanaan dan perlindungan LH.
Indikator: 1. Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. Jumlah KLHS kab/kota yang direviu

Menyajikan data kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Indikator: 1. Jumlah dokumen/data Status Lingkungan Hidup Kalsel yang Disusun

Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH.
Indikator: 1. Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang disusun sesuai ketentuan
2. Nilai Komponen Perencanaan pada LKjIP

Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Indikator: 1. Nilai komponen Pelaporan pada LKjIP Dinas LH 2. Persentase kab/kota yang dimonitoring mengenai sinkronisasi program LH 3. Persentase kab/kota yang dimonitoring mengenai pemantauan pelaksanaan DAK



PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR: NILAI SAKIP DINAS LH

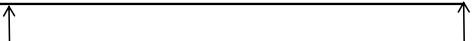
Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran dan kepegawaian. Indikator: 1. Persentase aset yang tercatat 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas LH 3. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS Dinas LH

Pelayanan administrasi keuangan. Indikator: Persentase penyerapan anggaran Dinas LH

Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran. Indikator: 1. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana yang disusun. 2. Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat

Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian Dinas LH. Indikator: Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib

Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan Dinas LH. Indikator: Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun
Jumlah laporan aset yang dibuat



Banjarbaru, 22 Agustus 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel

Ir. IKHLAS, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19591223 199103 1 002